



BUPATI AGAM

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM

NOMOR 123 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

BUPATI AGAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan akuntabel sesuai asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government*) dan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal, maka pemerintah daerah wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Bupati menetapkan Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Agam tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 645);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Agam Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang merupakan pedoman dan acuan dalam melaksanakan proses pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- KETIGA : Pengesahan Dokumen Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 9 Maret 2018

BUPATI AGAM
INDRA CATRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 123 TAHUN 2018
TANGGAL 9 MARET 2018

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN KETENAGAKERJAAN**

NO	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	KETERANGAN
1	Izin Pendirian Sekolah	Form 1 SOP-PZ1-A01
2	Izin Operasional Sekolah	Form 2 SOP-PZ1-A02
3	Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan	Form 3 SOP-PZ1-A03
4	Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan	Form 4 SOP-PZ1-A04
5	Izin pendirian Taman Bacaan Masyarakat	Form 5 SOP-PZ1-A05
6	Izin Operasional Taman Bacaan Masyarakat	Form 6 SOP-PZ1-A06
7	Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Form 7 SOP-PZ1-A07
8	Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Form 8 SOP-PZ1-A08
9	Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata	Form 9 SOP-PZ1-B01
10	Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata	Form 10 SOP-PZ1-B02
11	Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata	Form 11 SOP-PZ1-B03
12	Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata	Form 12 SOP-PZ1-B04
13	Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman	Form 13 SOP-PZ1-B05
14	Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi	Form 14 SOP-PZ1-B06
15	Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	Form 15 SOP-PZ1-B07
16	Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran	Form 16 SOP-PZ1-B08
17	Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata	Form 17 SOP-PZ1-B09
18	Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata	Form 18 SOP-PZ1-B10
19	Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata	Form 19 SOP-PZ1-B11
20	Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta	Form 20 SOP-PZ1-B012
21	Tanda Daftar Usaha SPA	Form 21 SOP-PZ1-B013
22	Izin Pemanfaatan Aset Daerah	Form 22 SOP-PZ1-B014
23	Izin Warung Telekomunikasi (Wartel)	Form 23 SOP-PZ1-C01
24	Izin Instalatur Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G)	Form 24 SOP-PZ1-C02

25	Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio atau Televisi	Form 25 SOP-PZ1-C03
26	Izin Usaha Perdagangan Alat/Perangkat Telekomunikasi	Form 26 SOP-PZ1-C04
27	Izin Usaha Penempatan Perangkat Telekomunikasi	Form 27 SOP-PZ1-C05
28	Izin Galian Kabel Telekomunikasi dalam Satu Kabupaten	Form 28 SOP-PZ1-C06
29	Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator	Form 29 SOP-PZ1-C07
30	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Form 30 SOP-PZ1-E01
31	Izin Mendirikan Bangunan Gedung Bertingkat	Form 31 SOP-PZ1-E02
32	Izin Mendirikan Bangunan Gedung Pemerintah	Form 32 SOP-PZ1-E03
33	Izin Mendirikan Bangunan Khusus	Form 33 SOP-PZ1-E04
34	Izin Penyewaan Alat Berat	Form 34 SOP-PZ1-E05
35	Izin Pemanfaatan Daerah Milik Jalan (DMJ)	Form 35 SOP-PZ1-E06
36	Izin Pemanfaatan Ruang Skala Kecil	Form 36 SOP-PZ1-E07
37	Izin Usaha Budidaya Pemberian Ikan	Form 37 SOP-PZ1-F01
38	Izin Usaha Perikanan Tambak	Form 38 SOP-PZ1-F02
39	Izin Usaha Budidaya Ikan (SIPBI)	Form 39 SOP-PZ1-F03
40	Izin Toko Obat Perikanan	Form 40 SOP-PZ1-F04
41	Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Form 41 SOP-PZ1-F05
42	Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Form 42 SOP-PZ1-G01
43	Izin Penelitian	Form 43 SOP-PZ1-G02
44	Rekomendasi Keramaian	Form 44 SOP-PZ1-G03
45	Izin Lokasi	Form 45 SOP-PZ1-H01
46	Rekomendasi IMB Perumahan & Pengembangan Kawasan Permukiman	Form 46 SOP-PZ1-H02
47	Rekomendasi Sarana Umum Perumahan	Form 47 SOP-PZ1-H03
48	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	Form 48 SOP-PZ1-I01
49	Kartu Pencari Kerja (AK.1)	Form 49 SOP-PZ1-I02
50	Izin Lembaga Swasta	Form 50 SOP-PZ1-I03
51	Izin Usaha Perkebunan (IUP)	Form 51 SOP-PZ1-J01
52	Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)	Form 52 SOP-PZ1-J02
53	Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P)	Form 53 SOP-PZ1-J03

54	Izin Pengumpulan Sumbangan	Form 54 SOP-PZ1-K01
55	Izin Pendirian Organisasi Sosial	Form 55 SOP-PZ1-K02
56	Izin Operasional Panti Asuhan	Form 56 SOP-PZ1-K03
57	Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP)	Form 57 SOP-PZ2-A01
58	Izin Usaha Industri (IUI)	Form 58 SOP-PZ2-A02
59	Tanda Daftar Gudang (TDG)	Form 59 SOP-PZ2-A03
60	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Form 60 SOP-PZ2-A04
61	Izin Usaha Perluasan Industri	Form 61 SOP-PZ2-A05
62	Izin Usaha Simpan Pinjam	Form 62 SOP-PZ2-A06
63	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi	Form 63 SOP-PZ2-A07
64	Izin Usaha Toko Modern	Form 64 SOP-PZ2-A08
65	Izin Tempat Usaha Perdagangan Kaki Lima	Form 65 SOP-PZ2-A09
66	Izin Pameran dan Promosi Dagang	Form 66 SOP-PZ2-A10
67	Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB)	Form 67 SOP-PZ2-A11
68	Rekomendasi Eksportir Terdaftar	Form 68 SOP-PZ2-A12
69	Tanda Daftar Industri (TDI)	Form 69 SOP-PZ2-A13
70	Izin Trayek Angkutan Pedesaan/Angkutan Kota	Form 70 SOP-PZ2-B01
71	Kartu Pengawas (KP) Angkutan Perdesaan/Angkot	Form 71 SOP-PZ2-B02
72	Izin Insidentil Angkutan Perdesaan/Angkot	Form 72 SOP-PZ2- B03
73	Izin Usaha Angkutan	Form 73 SOP-PZ2- B04
74	Kartu Kontrol Izin Usaha Angkutan	Form 74 SOP-PZ2- B05
75	Pas Kecil dan Sertifikat Keselamatan Kapal	Form 75 SOP-PZ2- B06
76	Surat Tanda Pendaftaran Kapal	Form 76 SOP-PZ2- B07
77	Izin Penyelenggaraan POS	Form 77 SOP-PZ2-B08
78	Izin Prinsip Penanaman Modal	Form 78 SOP-PZ2-C01
79	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	Form 79 SOP-PZ2-C02
80	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	Form 80 SOP-PZ2-C03
81	Izin Usaha (Perluasan, Perubahan, dan Penggabungan)	Form 81 SOP-PZ2-C04
82	Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi	Form 82 SOP-PZ2-D01

83	Izin Praktik Perawat	Form 83 SOP-PZ2-D02
84	Izin Praktik Bidan	Form 84 SOP-PZ2-D03
85	Surat Izin Pengobatan Tradisional (SIPT)	Form 85 SOP-PZ2-D04
86	Izin Laboratorium	Form 86 SOP-PZ2-D05
87	Izin Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D	Form 87 SOP-PZ2-D06
88	Izin Fisioterapis	Form 88 SOP-PZ2-D07
89	Izin Klinik	Form 89 SOP-PZ2-D08
90	Surat Izin Apotik (SIA)	Form 90 SOP-PZ2-D09
91	Surat Izin Perdagangan Eceran Obat	Form 91 SOP-PZ2-D010
92	Izin Penyelenggaraan Optikal	Form 92 SOP-PZ2-D11
93	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	Form 93 SOP-PZ2-D12
94	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	Form 94 SOP-PZ2-D13
95	Izin Sarana & Tenaga Kesehatan Lainnya Selain Tenaga Medis	Form 95 SOP-PZ2-D14
96	Izin Kerja Refraksionis Optisien / Optometris (SIKRO/SIKO)	Form 96 SOP-PZ2-D15
97	Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis)	Form 97 SOP-PZ2-D16
98	Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)	Form 98 SOP-PZ2-D17
99	Surat Izin Praktek / Kerja Fisioterapis (SIPF/SIKF)	Form 99 SOP-PZ2-D18
100	Izin Kerja / Praktek Tenaga Gizi (SIKTGz/SIPTGz)	Form 100 SOP-PZ2-D19
101	Izin Praktek Ahli Tekhnologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	Form 101 SOP-PZ2-D20
102	Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT)	Form 102 SOP-PZ2-D21
103	Izin Tukang Gigi	Form 103 SOP-PZ2-D22
104	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Cair B3	Form 104 SOP-PZ2-E01
105	Land Application	Form 105 SOP-PZ2-E02
106	Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)	Form 106 SOP-PZ2-E03
107	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)	Form 107 SOP-PZ2-E04
108	Izin Lingkungan	Form 108 SOP-PZ2-E05
109	Upaya Kelola Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL)	Form 109 SOP-PZ2-E06
110	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL)	Form 110 SOP-PZ2-E07
111	Rekomendasi Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas	Form 111 SOP-PZ2-E08

112	Izin Penggunaan Racun Api	Form 112 SOP-PZ2-F01
113	Izin Usaha Pertanian	Form 113 SOP-PZ2-G01
114	Izin Gangguan	Form 114 SOP-PZ2-H01
115	Izin Instalasi Genset	Form 115 SOP-PZ2-H02
116	Rekomendasi Wilayah Pertambangan (WIUP)	Form 116 SOP-PZ2-H03
117	Rekomendasi izin usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi	Form 117 SOP-PZ2-H04
118	Rekomendasi Izin Pertambangan rakyat (IPR)	Form 118 SOP-PZ2-H05
119	Rekomendasi Izin Pendirian SPBU	Form 119 SOP-PZ2-H06
120	Rekomendasi Izin Depot BBM	Form 120 SOP-PZ2-H07
121	Rekomendasi izin usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi	Form 121 SOP-PZ2-H08
122	Izin Energi Baru Terbarukan Bidang Panas Bumi	Form 122 SOP-PZ2-H09
123	Izin Usaha Pemotongan Hewan	Form 123 SOP-PZ2-I01
124	Izin Toko Obat Hewan	Form 124 SOP-PZ2-I02
125	Izin Usaha Peternakan	Form 125 SOP-PZ2-I03
126	Izin Praktek Dokter Hewan	Form 126 SOP-PZ2-I04
127	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Hewan	Form 127 SOP-PZ2-I05
128	Izin Rumah Potong Hewan	Form 128 SOP-PZ2-I06
129	Izin Reklame	Form 129 SOP-PZ2-L01
130	Rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruangan Daerah	Form 130 SOP-PZ2-M01



BUPATI AGAM

INDRA CATRI